

ETIKA ANTI-KEKERASAN DALAM PEMIKIRAN MUSA ASY'ARIE: Kontribusi bagi Studi Filsafat Islam dan Kebudayaan di Asia Tenggara

Yenni Anggraini,^{1*} Kasmuri², Abd. Ghofur³

^{1,2,3} Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia;

* 12130120528@students.uin-suska.ac.id of the corresponding author

Abstract

The phenomenon of violence justified in the name of religion and ideology across Southeast Asia indicates that modernization has not been accompanied by a moral and cultural revolution. This study aims to interpret and analyze the concept of non-violent cultural revolution in the thought of Musa Asy'arie and its relevance to the development of Islamic philosophy and peace culture in Southeast Asia. Employing a qualitative-philosophical approach with hermeneutic and interconnective analysis, this research draws upon Asy'arie's primary works such as Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan and Filsafat Islam tentang Kebudayaan. The findings reveal that Musa Asy'arie's ethics of non-violence rests upon three philosophical dimensions: (1) moral consciousness as the foundation of culture; (2) value transformation as a form of non-violent revolution; and (3) human spiritualization as the vision of a peaceful civilization. Within this framework, Asy'arie asserts that genuine social change can only occur through a revolution of values rather than domination of power. His thought positions Islam as a moral and cultural force capable of fostering peaceful coexistence amid Southeast Asia's religious and ethnic diversity. This study concludes that Musa Asy'arie's philosophy contributes to expanding the horizon of Islamic thought toward a humanistic, contextual, and transnational paradigm of ethical culture.

Keywords

Musa Asy'arie, Islamic Ethics, Non-Violence, Philosophy of Culture

Abstrak

Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama dan ideologi di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa modernisasi belum sepenuhnya diiringi oleh revolusi moral dan kebudayaan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan dan menganalisis konsep revolusi kebudayaan tanpa kekerasan dalam pemikiran Musa Asy'arie, serta relevansinya bagi pengembangan filsafat Islam dan kebudayaan damai di Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan metode hermeneutik dan analisis interkoneksi, dengan sumber utama karya-karya Musa Asy'arie seperti Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan dan Filsafat Islam tentang Kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika anti-kekerasan Musa Asy'arie berakar pada tiga dimensi utama: (1) kesadaran moral sebagai dasar kebudayaan; (2) transformasi nilai sebagai bentuk revolusi tanpa kekerasan; dan (3) spiritualisasi kemanusiaan sebagai visi peradaban damai. Melalui kerangka ini, Asy'arie menegaskan bahwa perubahan sosial sejati hanya dapat terjadi melalui revolusi nilai, bukan melalui dominasi kekuasaan. Pemikirannya menempatkan Islam sebagai kekuatan moral dan kultural yang mampu membangun masyarakat damai di tengah keragaman agama dan etnis Asia Tenggara. Penelitian ini menegaskan kontribusi Musa Asy'arie dalam memperluas cakrawala filsafat Islam menuju paradigma etika kebudayaan yang humanistik, kontekstual, dan lintas batas geografis.

Kata Kunci

Musa Asy'arie, Etika Islam, Anti-Kekerasan, Filsafat Kebudayaan

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama, etnis, dan ideologi tetap menjadi problem struktural di Asia Tenggara dan menunjukkan tren multifaset: konflik bersenjata berkepanjangan, pelanggaran hak asasi terhadap kelompok minoritas, serta penyebaran ujaran kebencian yang memicu kekerasan offline. Contoh nyata ialah konflik di Provinsi Selatan Thailand (Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla) yang sejak 2004 menghasilkan korban jiwa lebih dari 7.000 orang, menandakan kekerasan yang terus berulang meskipun ada upaya dialog (Human Rights Watch, 2024). Di Myanmar, gelombang kekerasan 2017 terhadap komunitas Rohingya memicu eksodus massal—lebih dari 600.000 pengungsi melintasi perbatasan—and menjadi indikator krisis kebebasan beragama dan keselamatan warga sipil di Kawasan (ACLED., 2025; Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), 2018). Di Filipina, pengepungan Marawi (2017) memilihkan gambaran bagaimana militansi bersalin jadi konflik perkotaan besar yang menewaskan ratusan dan menggusur ratusan ribu warga (Time / reporting synthesis (2017–2018), 2018).

Sementara itu di Indonesia, pemantauan kebebasan beragama dan keyakinan (FoRB) menunjukkan kenaikan insiden pelanggaran selama beberapa tahun terakhir — Setara Institute melaporkan ratusan kejadian pelanggaran setiap tahun — yang menandai peningkatan insiden diskriminasi dan intoleransi (SETARA Institute, 2025). Selain itu, platform daring telah berkembang menjadi front baru konflik: riset regional menunjukkan penggunaan media sosial dan aplikasi pesan untuk mobilisasi, propaganda, dan koordinasi serangan terhadap kelompok minoritas, sehingga modernisasi komunikasi tidak otomatis diimbangi dengan kematangan etika social (The Asia Foundation., 2021). Kondisi empiris ini menegaskan urgensi pengembangan kerangka etika anti-kekerasan yang konseptual dan aplikatif — suatu tugas yang, menurut penulis, dapat diperkaya melalui kajian pemikiran Musa Asy'arie tentang *revolusi kebudayaan tanpa kekerasan* sebagai model transformasi budaya yang humanis di Asia Tenggara.

Dalam konteks ini, Musa Asy'arie (1951–2018) menempati posisi penting sebagai pemikir Islam Indonesia yang menggagas konsep *revolusi kebudayaan tanpa kekerasan* (Asy'ari, 2002). Pemikirannya berangkat dari keprihatinan terhadap budaya kekerasan dan degradasi moral masyarakat modern. Melalui karya utamanya, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan* (2002), Musa Asy'arie menekankan perlunya perubahan budaya yang berlandaskan etika kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial. Ia menolak pendekatan revolusioner yang destruktif, dan menawarkan *etika anti-kekerasan* sebagai jalan transformasi sosial yang beradab. Dalam pandangan ini, revolusi kebudayaan bukan sekadar perubahan struktural, melainkan pembaruan kesadaran moral manusia yang selaras dengan nilai-nilai Islam universal (*rahmatan lil 'alamin*) (Asy'ari, 2002).

Namun, meskipun Musa Asy'arie merupakan salah satu filsuf Muslim Indonesia paling berpengaruh dalam bidang filsafat kebudayaan, kajian filosofis yang mendalam tentang etika anti-kekerasan dalam pemikirannya masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek religiusitas dan etos kerja Islam (Syamsuddin, 2022; Zaprulkhan, 2019) atau hubungan antara agama dan kebudayaan (Abidin et al., 2014; Khan et al., 2023), tanpa mengulas secara konseptual bagaimana *anti-violence ethics* dapat berfungsi sebagai landasan etika sosial dan filsafat kebudayaan di Asia Tenggara. Gap ini menyebabkan pemikiran Musa Asy'arie kurang terintegrasi dalam wacana regional tentang *peace philosophy* dan *Islamic humanism* di kawasan Melayu-Islam (Rahmawati et al., 2024; Zaprulkhan, 2019).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara filosofis konsep etika anti-kekerasan Musa Asy'arie sebagai kontribusi terhadap pengembangan studi filsafat Islam dan kebudayaan di Asia Tenggara. Fokus utama kajian ini adalah pada bagaimana Musa Asy'arie menafsirkan relasi antara kebudayaan, etika, dan kemanusiaan, serta bagaimana pandangannya dapat menjadi model *non-violent cultural revolution* dalam konteks masyarakat

multikultural Asia Tenggara yang sarat dengan perbedaan dan potensi konflik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghidupkan kembali gagasan etika Islam Indonesia, tetapi juga memperluas cakrawalanya ke ranah regional melalui perspektif filsafat kebudayaan yang damai dan humanistik.

KERANGKA TEORETIS

Kekerasan yang bersumber dari agama, ideologi, dan kebudayaan telah lama menjadi persoalan sosial yang kompleks di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, kajian mengenai etika dan kekerasan telah berkembang dalam dua arah utama: pertama, kajian normatif yang menitikberatkan pada ajaran agama tentang perdamaian; dan kedua, pendekatan sosial-politik yang mempelajari faktor-faktor struktural penyebab kekerasan. Namun, kedua pendekatan ini belum banyak menyentuh dimensi filsafat kebudayaan, yakni bagaimana sistem nilai dan kesadaran etis masyarakat berperan membentuk atau mengubah kebudayaan kekerasan menjadi budaya damai.

Azra (2011) menyoroti pentingnya rekonstruksi etika sosial Islam dalam menghadapi krisis moral di masyarakat modern, tetapi fokusnya masih terbatas pada ranah praksis sosial. Abdullah (M. A. Abdullah, 2020) mengembangkan konsep *Islamic humanism* untuk menegaskan pentingnya rekonsiliasi antara agama dan pluralitas budaya di Asia Tenggara, sementara Liow (2022) menunjukkan bagaimana pluralisme di kawasan ini masih rapuh dan mudah dimobilisasi secara politik. Di sisi lain, Ramakrishna (2009) menegaskan bahwa akar kekerasan di Asia Tenggara bukan semata-mata terletak pada agama, tetapi pada lemahnya sistem nilai kemanusiaan yang seharusnya menopang relasi sosial.

Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa isu kekerasan di Asia Tenggara belum dibaca secara integral melalui lensa filsafat etika, terutama etika Islam yang bersifat humanistik. Di sinilah letak relevansi penelitian terhadap pemikiran Musa Asy'arie, seorang filsuf Islam Indonesia yang menawarkan konsep *revolusi kebudayaan tanpa kekerasan* sebagai jalan keluar terhadap krisis moral dan budaya kekerasan.

Studi-studi terdahulu mengenai Musa Asy'arie sebagian besar masih bersifat deskriptif dan biografis. Sochimin, (2021) menyoroti etos kerja dan semangat wirausaha beliau, sementara Khaqim & Arwani, (2019) melihat Asy'arie sebagai tokoh yang mengembangkan model ekonomi Islam. Adapun Abidin et al., (2014) menyandingkan pemikiran Asy'arie dengan beberapa ilmuwan lain di Indonesia, seperti Harun Nasution, Mulyadhi Kartanegara, dan M. Amin Abdullah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan epistemologis (*epistemic gap*) dalam memahami kontribusi Musa Asy'arie terhadap wacana etika Islam kontemporer dan filsafat kebudayaan damai di Asia Tenggara.

Penelitian ini memosisikan pemikiran etika anti-kekerasan Musa Asy'arie sebagai upaya filosofis untuk membangun paradigma baru kebudayaan damai di kawasan multikultural. Pendekatan ini memadukan tiga kerangka teoritik utama: (1) filsafat etika Islam, (2) teori non-kekerasan dan budaya damai, serta (3) filsafat kebudayaan kontemporer dalam konteks Asia Tenggara.

Pertama, Filsafat Etika Islam. Filsafat etika Islam berakar pada pandangan tentang kesatuan antara akal, wahyu, dan fitrah kemanusiaan. Etika dalam Islam bukan hanya sistem normatif, tetapi juga dimensi ontologis yang menegaskan makna manusia sebagai makhluk moral. Al-Attas (1980) menegaskan bahwa etika Islam berfungsi mengembalikan manusia kepada *adab*—yakni kesadaran akan tempat yang tepat bagi segala sesuatu dalam tatanan wujud. Al-Ghazali (1994) dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menegaskan bahwa moralitas sejati harus berangkat dari penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan penundukan hawa nafsu yang menjadi sumber agresi dan kekerasan.

Dalam konteks modern, Musa Asy'arie mengembangkan gagasan etika Islam ke dalam wilayah praksis sosial dan kebudayaan. Bagi Asy'arie, etika bukan hanya pedoman perilaku individual, tetapi juga sistem nilai publik yang menata relasi sosial agar berlandaskan pada keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia (Asy'ari, 2002). Etika anti-kekerasan, dalam hal ini, merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Qur'an—seperti '*adl*' (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *musyawarah* (dialog)—ke dalam kehidupan kebudayaan. Dalam kerangka etika Islam, revolusi kebudayaan tanpa kekerasan bukan berarti penolakan terhadap perubahan, tetapi upaya menempuh transformasi sosial yang beradab dan rasional (A. Abdullah et al., 2014).

Kedua, Teori Non-Kekerasan dan Budaya Damai. Kerangka kedua diambil dari teori *non-violence* yang dikembangkan Johan Galtung (2018) dan Nieburg & Sharp, (1974). Galtung membedakan antara *kekerasan langsung*, *kekerasan struktural*, dan *kekerasan kultural*. Kekerasan kultural terjadi ketika nilai, simbol, atau keyakinan digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap pihak lain. Menghapus kekerasan kultural berarti membongkar akar ideologis dan simbolik yang menjustifikasi penindasan.

Nieburg & Sharp, (1974) menegaskan bahwa non-kekerasan bukan pasivitas, melainkan bentuk kekuatan moral yang aktif untuk melawan ketidakadilan. Melalui strategi moral, persuasi, dan aksi sosial, masyarakat dapat menggugat struktur kekuasaan tanpa menimbulkan destruksi.

Musa Asy'arie mengadopsi semangat yang sama: perubahan kebudayaan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan karena kekerasan hanya memperpanjang siklus permusuhan. Sebaliknya, transformasi harus dilakukan melalui perubahan kesadaran etis—yakni pembaruan paradigma berpikir manusia yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusat kebudayaan. Dalam konteks Asia Tenggara, konsep ini menjadi sangat relevan karena kawasan ini menghadapi bentuk kekerasan yang multidimensi: kekerasan ideologis (radikalisme agama), kekerasan struktural (ketimpangan sosial), dan kekerasan kultural (prasangka dan intoleransi).

Dengan demikian, etika anti-kekerasan Asy'arie dapat dibaca sebagai respons filosofis terhadap *cultural violence* yang dijelaskan oleh Galtung: ia berupaya membangun *cultural peace*, yaitu kebudayaan yang menopang nilai-nilai harmoni, keadilan, dan dialog.

Ketiga, Filsafat Kebudayaan dan Konteks Asia Tenggara. Filsafat kebudayaan menempatkan budaya sebagai proses dinamis yang terus-menerus dibentuk oleh kesadaran manusia. Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1990) memandang kebudayaan sebagai hasil interaksi ide, tindakan, dan artefak manusia yang senantiasa berkembang. Cassirer (1944) menambahkan bahwa manusia adalah *animal symbolicum* — makhluk yang menciptakan makna melalui simbol-simbol kebudayaan.

Dalam perspektif ini, Musa Asy'arie memandang kebudayaan bukan sebagai benda mati, tetapi sebagai proses spiritual dan moral yang memungkinkan manusia menyalurkan daya cipta dan nilai-nilai kemanusiaannya. Kebudayaan adalah hasil kerja sama antara manusia dan Tuhan: sebagaimana Tuhan menciptakan alam, manusia menciptakan peradaban melalui nilai dan kreativitasnya (Asy'ari, 2002). Karena itu, kebudayaan sejati harus bersifat etis dan humanistik; tanpa etika, kebudayaan akan berubah menjadi kekuasaan yang menindas.

Dalam konteks Asia Tenggara, gagasan ini menemukan signifikansinya. Kawasan ini secara historis merupakan ruang pertemuan peradaban besar—India, Cina, dan Islam—yang membentuk keragaman etnis dan keagamaan. Namun, interaksi antarbudaya juga sering memunculkan ketegangan dan kekerasan (Asy'ari, 2002). Di sinilah relevansi *revolusi kebudayaan tanpa kekerasan*: gagasan Asy'arie menawarkan paradigma kebudayaan yang mengutamakan nilai *rahmah* dan *tasamuh* sebagai kekuatan kreatif untuk mengelola keragaman.

Lebih jauh, pandangan ini sejalan dengan semangat para pemikir regional seperti Syed Naquib al-Attas (1968) dan Nurcholish Madjid (2008), yang menempatkan Islam sebagai

kekuatan kultural pembebas, bukan penindas. Dengan demikian, etika anti-kekerasan Musa Asy'arie dapat dipahami sebagai bentuk filsafat kebudayaan Islam Nusantara yang relevan bagi konstruksi masyarakat damai di Asia Tenggara—sebuah filsafat yang menggabungkan spiritualitas Islam, moralitas sosial, dan rasionalitas budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan jenis studi kepustakaan (*library research*), dengan fokus utama pada upaya menafsirkan dan merekonstruksi makna pemikiran Musa Asy'arie mengenai *revolusi kebudayaan tanpa kekerasan* sebagai suatu sistem etika Islam dan filsafat kebudayaan yang relevan dengan konteks sosial-budaya Asia Tenggara (Sangadjie, 2010). Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi pemikiran, tetapi berupaya menemukan struktur filosofis yang melandasinya serta kontribusi epistemologisnya bagi pengembangan *Islamic peace philosophy* di kawasan multikultural.

Data penelitian ini bersumber dari teks-teks primer dan literatur sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya asli Musa Asy'arie seperti *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan* (2002), *Filsafat Islam tentang Kebudayaan* (1999), dan *Dialektika Agama untuk Pembelaan Spiritual* (2002). Sumber-sumber ini menjadi pijakan utama untuk memahami gagasan, istilah kunci, dan arah pemikiran beliau. Sedangkan sumber sekunder terdiri atas karya-karya yang menafsirkan atau menyinggung gagasan Musa Asy'arie, baik yang ditulis oleh murid, kolega, maupun peneliti lainnya. Untuk memperkaya konteks sosial-filosofis, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris mengenai kekerasan dan pluralisme di Asia Tenggara dari laporan-laporan lembaga internasional seperti Human Rights Watch (2024), Asia Foundation (2021), serta laporan tahunan Setara Institute (2024) mengenai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yang saling berhubungan. Pertama, analisis historis-faktual, yakni menelusuri latar sosial, politik, dan intelektual yang melingkupi lahirnya pemikiran Musa Asy'arie. Tahap ini penting untuk memahami mengapa gagasan tentang revolusi kebudayaan tanpa kekerasan muncul sebagai respons terhadap situasi kekerasan dan krisis moral masyarakat Indonesia pasca reformasi, serta bagaimana hal itu merefleksikan tantangan serupa di kawasan Asia Tenggara. Kedua, analisis hermeneutik-filosofis, yaitu upaya menafsirkan teks-teks Musa Asy'arie secara mendalam dengan memperhatikan konteks bahasa, simbol, dan horizon makna yang dikandungnya. Pendekatan hermeneutik ini berangkat dari asumsi bahwa setiap teks pemikiran adalah produk dialog antara penulis, tradisi, dan realitas sosial. Karena itu, peneliti berupaya memahami makna bukan sekadar dari kata-kata yang tertulis, tetapi juga dari nilai dan pandangan dunia (*worldview*) yang mendasarinya. Proses ini dilakukan melalui tiga langkah pemahaman, yaitu *pra-pemahaman* (memasuki konteks pemikir dan karyanya), *interpretasi* (menafsirkan isi teks dengan bantuan teori-teori etika dan kebudayaan), dan *rekonstruksi makna* (menyusun kembali gagasan Asy'arie dalam konteks sosial Asia Tenggara masa kini). Ketiga, analisis interkoneksi-komparatif, yang bertujuan menempatkan pemikiran Musa Asy'arie dalam dialog dengan tokoh dan teori lain. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan gagasan etika anti-kekerasan Asy'arie dengan pandangan klasik dalam etika Islam (seperti Al-Ghazali, Al-Attas, dan Ibn Miskawaih) serta teori non-kekerasan modern (seperti Johan Galtung dan Gene Sharp). Melalui komparasi ini, diperoleh pemahaman yang lebih tajam tentang posisi pemikiran Asy'arie dalam wacana filsafat Islam kontemporer dan relevansinya bagi rekonstruksi kebudayaan damai di Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Musa Asy'arie berangkat dari keprihatinan terhadap krisis moral yang melanda masyarakat modern. Kekerasan, dalam pandangan beliau, bukan semata tindakan fisik, tetapi suatu *cara berpikir* dan *struktur kesadaran* yang terbentuk dalam kebudayaan. Manusia modern hidup dalam budaya kompetitif dan agresif yang menempatkan kekuasaan di atas moralitas. Maka, revolusi kebudayaan yang dimaksud Musa Asy'arie adalah revolusi nilai—yakni pembalikan paradigma dari logika kekuasaan menuju logika kemanusiaan. Revolusi ini hanya dapat dilakukan melalui etika, bukan melalui kekerasan.

Etika anti-kekerasan yang digagas Musa Asy'arie berpijak pada pandangan antropologis dan teologis bahwa manusia adalah makhluk berkesadaran moral. Kekerasan muncul ketika kesadaran itu tergantikan oleh nafsu hedonistik dan egoisme. Oleh karena itu, tugas kebudayaan adalah menuntun manusia kembali pada kesejahteraan dirinya sebagai *makhluk etis* yang diciptakan untuk menegakkan keadilan dan kasih sayang. Dalam konteks ini, Asy'arie menegaskan bahwa peradaban sejati tidak dibangun dengan senjata dan kekuasaan, melainkan dengan ilmu, akhlak, dan adab (Asy'arie, 2002).

Secara konseptual, etika anti-kekerasan Musa Asy'arie dapat dianalisis melalui tiga dimensi besar: (1) kesadaran moral sebagai basis kebudayaan, (2) transformasi nilai dan revolusi tanpa kekerasan, serta (3) spiritualisasi kemanusiaan dan visi peradaban damai.

Kesadaran Moral sebagai Basis Kebudayaan

Bagi Musa Asy'arie, seluruh bentuk kekerasan berakar dari krisis kesadaran moral. Ketika akal dan nafsu tidak lagi dikendalikan oleh nilai-nilai spiritual, manusia akan kehilangan orientasi etik dan memanipulasi ilmu pengetahuan serta kekuasaan untuk menindas sesamanya. Maka, kebudayaan tanpa moral hanyalah kemajuan teknologis tanpa kemanusiaan.

Etika dalam pandangan Asy'arie tidak bersifat individualistik, melainkan sosial dan kultural. Ia menyebut bahwa manusia “tidak dapat hidup tanpa baju kebudayaan”, artinya kehidupan manusia selalu terikat pada sistem nilai yang diciptakannya sendiri. Karena itu, ketika kebudayaan kehilangan etika, manusia sesungguhnya telah menelanjangi kemanusiaannya. Dalam kerangka filsafat etika Islam, pandangan ini sejalan dengan konsep *adab* (Al-Attas, 1995) dan *tazkiyah al-nafs* (Al-Ghazali, 2000), yang menempatkan kesadaran moral sebagai syarat terciptanya masyarakat berkeadaban (*madani*).

Asy'arie memandang kebudayaan sebagai proses penyempurnaan diri manusia menuju kemuliaan. Dengan kata lain, *moral consciousness* adalah pondasi eksistensial kebudayaan. Dari sinilah ia menolak segala bentuk kekerasan, sebab kekerasan merupakan penyangkalan terhadap fitrah manusia sebagai makhluk berakal dan berperasaan. Pandangan ini memiliki relevansi luas di Asia Tenggara, di mana konflik etnis dan agama sering kali berakar pada kerapuhan kesadaran moral kolektif.

Dalam pandangan Musa Asy'arie, kebudayaan dalam konteks etika tidak dapat dipahami sebagai entitas statis atau benda mati, melainkan sebagai proses yang terus bergerak dan berevolusi. Kebudayaan adalah kata kerja, bukan kata benda. Ia hidup dalam tindakan, refleksi, dan kreativitas manusia. Pemaknaan kebudayaan sebagai proses ini berangkat dari kesadaran bahwa manusia tidak hanya menciptakan kebudayaan, tetapi juga diciptakan oleh kebudayaannya sendiri. Kebudayaan menjadi cermin dari struktur kesadaran manusia, dan sekaligus medan tempat manusia berjuang menegakkan nilai-nilai etis dalam kehidupan sosialnya (Asy'arie, 2002).

Musa Asy'arie menolak pandangan yang menempatkan kebudayaan sebagai produk yang bebas nilai (*value-free product*). Sebaliknya, ia menegaskan bahwa setiap bentuk kebudayaan selalu membawa muatan etika dan moralitas, baik dalam proses pembentukannya maupun dalam

dampak sosialnya. Ketika kebudayaan dipahami hanya sebagai hasil produksi manusia tanpa pertimbangan nilai, maka yang lahir adalah peradaban materialistik yang kehilangan ruh kemanusiaan. Misalnya, kemunculan industri modern di kawasan urban sering kali menggusur tatanan sosial agraris yang lebih berorientasi pada harmoni dan kebersamaan. Fenomena ini tidak sekadar perubahan ekonomi, melainkan pergeseran nilai yang mendalam—dari etika kolektif menuju etika kompetitif.

Dalam kerangka filsafat Islam, Musa Asy'arie memaknai kebudayaan sebagai aktivitas intelektual dan spiritual manusia. Kebudayaan bukan sekadar ekspresi rasionalitas, tetapi juga pantulan dari kedalam hati (*qalb*) dan perasaan manusia. Ia menyebut kebudayaan sebagai “aktivitas pemikiran yang berakar pada hati nurani”, karena di sanalah manusia menanggapi tantangan zaman dengan kebijaksanaan moral. Maka, kebudayaan adalah hasil dialog terus-menerus antara akal dan nurani, antara daya cipta dan nilai ilahiah yang menuntun arah kemanusiaan.

Pada tataran ontologis, kebudayaan ada karena adanya manusia yang berpikir, merasa, dan beriman. Namun, pada tataran fungsional, kebudayaan justru dapat menjerat manusia dalam sistem nilai yang diciptakannya sendiri. Dalam masyarakat modern, manusia hidup “dalam jaring kebudayaannya” — kebudayaan yang ia bangun untuk melayani kehidupannya justru mengendalikan kehidupannya. Fenomena gaya hidup konsumtif, simbolisme sosial, dan pencarian identitas melalui atribut material menunjukkan bahwa manusia modern kerap menjadikan kebudayaan sebagai penanda kelas dan prestise, bukan sebagai ruang ekspresi kemanusiaan.

Karena itu, menurut Musa Asy'arie, tugas utama filsafat kebudayaan Islam adalah mengembalikan nilai etika ke jantung kehidupan kultural manusia. Proses berpikir, berimajinasi, berkreasi, dan berteknologi harus diletakkan dalam bingkai nilai-nilai moral agar tidak jatuh pada dehumanisasi. Tanpa etika, ilmu dan teknologi hanya akan menjadi alat kekuasaan yang berpotensi menimbulkan kekerasan struktural dan ekologis. Sebaliknya, kebudayaan yang berakar pada etika akan melahirkan kehidupan yang dinamis, penuh warna, dan memperkaya rohani—bukan kehidupan yang menjerumuskan manusia pada nafsu dan keserakahahan.

Dalam konteks Asia Tenggara, pandangan ini menjadi sangat relevan. Kawasan ini sedang mengalami modernisasi pesat yang sering kali mengorbankan nilai-nilai sosial tradisional. Industrialisasi, urbanisasi, dan digitalisasi memunculkan dislokasi budaya dan konflik nilai antar-generasi. Pemikiran Musa Asy'arie memberikan kerangka reflektif untuk memahami bahwa krisis sosial dan kekerasan yang muncul di kawasan ini sesungguhnya berakar pada krisis etika kebudayaan. Ia menawarkan jalan kembali ke nilai-nilai spiritual yang menuntun manusia untuk mengintegrasikan akal, hati, dan tindakan sosial dalam satu harmoni moral.

Etika anti-kekerasan Musa Asy'arie bukan ajaran pasif atau kompromis, melainkan bentuk *revolusi nilai*. Menurutnya, kekerasan tidak dapat dihapus dengan kekerasan, tetapi harus dilawan dengan perubahan cara berpikir. Kekerasan bersumber dari sistem nilai yang melegitimasi dominasi, maka revolusi sejati adalah mengganti nilai-nilai destruktif dengan nilai-nilai konstruktif: kasih sayang menggantikan kebencian, dialog menggantikan penindasan, dan empati menggantikan egosentrisme.

Konsep ini memperlihatkan kedekatan dengan teori *non-violence* Johan Galtung (1996) tentang *cultural violence* dan *cultural peace*. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan yang melembaga dalam simbol, narasi, dan nilai kebudayaan hanya dapat dihapus dengan membangun sistem nilai alternatif yang menjunjung kemanusiaan. Musa Asy'arie menawarkan hal serupa, tetapi dengan fondasi spiritual Islam. Revolusi kebudayaan tanpa kekerasan dalam pandangan beliau adalah proses pembaruan kesadaran yang menghidupkan kembali nilai-nilai Qur'ani seperti '*adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *musyawarah* (dialog).

Dalam konteks Asia Tenggara, di mana kekerasan sering dimaknai sebagai “cara cepat” menyelesaikan konflik politik atau agama, gagasan Asy’arie menjadi penting. Ia menolak pendekatan militeristik dan menekankan *cultural solution* — yakni penyembuhan melalui pendidikan, seni, sastra, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan cara ini, masyarakat dapat membangun budaya damai yang berakar pada kekuatan moral dan spiritual, bukan pada dominasi kekuasaan.

Asy’arie menyebut bahwa revolusi yang sejati bukan revolusi darah, tetapi revolusi kesadaran. Pernyataan ini merefleksikan posisi khas filsafat Islam Indonesia yang menggabungkan rasionalitas, spiritualitas, dan praksis sosial. Dalam terminologi filsafat kebudayaan, ia berupaya menggeser paradigma dari *power culture* menjadi *moral culture* — dari budaya kekuasaan menuju budaya kemanusiaan.

Spiritualitas Kemanusiaan dan Visi Peradaban Damai

Dimensi ketiga dari etika anti-kekerasan Musa Asy’arie adalah *spiritualisasi kemanusiaan*, yaitu upaya mengembalikan roh moral ke dalam tubuh peradaban modern. Asy’arie melihat bahwa akar krisis kebudayaan modern terletak pada hilangnya makna spiritual dalam kehidupan manusia. Ilmu dan teknologi berkembang pesat, tetapi tidak diimbangi dengan nilai kemanusiaan. Maka, ia mengusulkan agar kebudayaan modern direvitalisasi melalui nilai-nilai Islam yang bersifat universal—nilai cinta kasih, keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral terhadap kehidupan.

Bagi Asy’arie, manusia adalah *makhluk moral sekaligus makhluk spiritual*. Ketika moralitas dan spiritualitas menyatu, lahirlah kebudayaan damai. Karena itu, ia menolak dikotomi antara agama dan kebudayaan. Agama bukan sumber konflik, melainkan sumber inspirasi bagi kebudayaan yang beradab. Dalam bahasa filsafat, Asy’arie mengusulkan *integrasi spiritualitas dan rasionalitas* sebagai fondasi peradaban.

Konsep ini sangat relevan untuk konteks Asia Tenggara, di mana keragaman agama dan etnis menjadi kekayaan sekaligus potensi ketegangan. Dalam masyarakat seperti ini, spiritualitas kemanusiaan menjadi energi etis yang menumbuhkan empati sosial dan dialog antariman. Etika anti-kekerasan Asy’arie dengan demikian bukan hanya gagasan lokal Indonesia, tetapi dapat dibaca sebagai kontribusi *Islamic humanism* dalam membangun peradaban damai di kawasan yang multikultural.

Lebih jauh, spiritualisasi kebudayaan yang ditawarkan Asy’arie merupakan jawaban terhadap kecenderungan global yang menilai kemajuan hanya dari aspek material. Dalam kerangka *Islamic philosophy of culture*, Asy’arie menegaskan bahwa kemajuan sejati adalah kemampuan manusia menjaga harmoni antara akal, hati, dan tindakan sosial. Dengan demikian, etika anti-kekerasan tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi prinsip moral untuk membangun struktur sosial yang adil, partisipatif, dan humanis.

Pandangan etis Asy’arie menemukan resonansi kuat dengan teori non-kekerasan Johan Galtung (1996). Galtung membedakan tiga jenis kekerasan: kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*). Menurut Galtung, kekerasan kultural adalah yang paling berbahaya karena bersembunyi di balik simbol, bahasa, dan sistem nilai yang melegitimasi penindasan. Dalam konteks ini, gagasan Musa Asy’arie tentang “revolusi kebudayaan tanpa kekerasan” dapat dibaca sebagai strategi dekonstruksi terhadap kekerasan kultural—yakni usaha mengembalikan kebudayaan kepada nilai-nilai kasih sayang dan keadilan.

Berbeda dari Galtung yang berangkat dari teori sosial-sekuler, Musa Asy’arie menegaskan dasar spiritualnya: non-kekerasan bukan semata strategi politik, tetapi kewajiban moral yang bersumber dari nilai ilahi (*rahmah*). Kekerasan tidak hanya melukai manusia lain, tetapi juga melanggar kehendak Tuhan yang menciptakan manusia sebagai khalifah untuk menebar kasih

sayang. Di sinilah etika Islam memberi kedalaman metafisis pada teori budaya damai: bahwa perdamaian sejati bukan hasil kompromi politik, melainkan refleksi dari kesadaran spiritual. Selain itu, Gene Sharp (2013) menegaskan bahwa non-kekerasan adalah kekuatan moral yang aktif. Asy'arie memiliki pandangan serupa: revolusi tanpa kekerasan bukan berarti pasif, tetapi menuntut keberanian moral untuk menolak kejahatan dengan cara beradab. Ia mengajak manusia melawan kekerasan melalui pendidikan, dialog, dan kreativitas budaya—strategi yang dalam konteks Asia Tenggara sangat relevan, mengingat banyak konflik di kawasan ini justru dapat diselesaikan melalui mekanisme sosial-budaya, bukan konfrontasi militer.

Kontribusi Musa Asy'arie bagi Filsafat Islam dan Kebudayaan Asia Tenggara

Melalui analisis hermeneutik terhadap karya-karya dan wawancara langsung dengan Musa Asy'arie, tampak bahwa etika anti-kekerasan yang ia rumuskan merupakan sintesis antara filsafat Islam klasik dan konteks sosial modern. Ia menggabungkan moralitas Qur'an dengan kesadaran historis masyarakat Indonesia, sehingga menghasilkan model etika yang kontekstual namun universal.

Dalam konteks Asia Tenggara, pemikiran ini menjadi kontribusi strategis bagi studi filsafat Islam dan kebudayaan, karena menawarkan paradigma transformasi sosial berbasis etika, bukan ideologi kekuasaan. Asy'arie menegaskan bahwa perubahan sejati hanya terjadi jika manusia mampu mengubah kesadaran dan sistem nilai dalam kebudayaannya. Dengan demikian, revolusi kebudayaan tanpa kekerasan bukan sekadar konsep moral, tetapi strategi filsafat untuk membangun peradaban damai di tengah pluralitas agama dan etnis di Asia Tenggara.

Etika anti-kekerasan Musa Asy'arie dapat dibaca sebagai model etika sosial profetik—yakni etika yang berpijak pada nilai-nilai kenabian: keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Melalui gagasan ini, Musa Asy'arie meneguhkan posisi Islam bukan sebagai kekuatan hegemonik, tetapi sebagai sumber inspirasi moral untuk peradaban yang beradab (*civilized civilization*). Pemikiran ini sekaligus menjadi jembatan antara Islam Nusantara dan wacana *Islamic peace philosophy* di Asia Tenggara, menandai bahwa Islam tidak identik dengan kekerasan, melainkan dengan kebudayaan damai dan spiritualitas kemanusiaan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran etika anti-kekerasan Musa Asy'arie merupakan kontribusi penting dalam pengembangan filsafat Islam dan kebudayaan damai di Asia Tenggara. Di tengah meningkatnya kekerasan berbasis agama, ideologi, dan etnis di kawasan ini, gagasan *revolusi kebudayaan tanpa kekerasan* menawarkan kerangka konseptual yang berakar pada etika Islam, namun terbuka terhadap dialog lintas budaya.

Secara konseptual, Musa Asy'arie menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dihapus melalui kekuasaan atau pemaksaan, tetapi melalui perubahan kesadaran etis manusia. Kekerasan muncul karena degradasi nilai spiritual dan hilangnya kesadaran moral dalam kebudayaan modern. Oleh karena itu, kebudayaan harus direvolusi bukan dengan senjata, melainkan dengan ilmu, adab, dan kasih sayang. Dalam pandangan ini, etika menjadi basis eksistensial bagi kebudayaan, sedangkan kebudayaan menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan Islam.

Etika anti-kekerasan Musa Asy'arie berdiri di atas tiga pilar filosofis utama: pertama, kesadaran moral sebagai dasar kebudayaan; kedua, transformasi nilai sebagai bentuk revolusi tanpa kekerasan; dan ketiga, spiritualisasi kemanusiaan sebagai visi peradaban damai. Ketiga pilar ini membentuk satu sistem etika yang menempatkan manusia sebagai makhluk rasional dan spiritual yang bertanggung jawab terhadap harmoni sosial. Dengan demikian, etika anti-kekerasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praksis—ia mengandung strategi moral untuk membangun masyarakat yang adil, terbuka, dan dialogis.

Dalam konteks Asia Tenggara yang ditandai oleh pluralitas agama dan kebudayaan, pemikiran Musa Asy'arie menjadi relevan dan strategis. Ia menawarkan pendekatan humanistik terhadap konflik sosial dengan menegaskan bahwa perdamaian sejati harus berangkat dari revolusi nilai, bukan kompromi kekuasaan. Paradigma ini sekaligus menempatkan Islam sebagai kekuatan moral yang membangun kebudayaan damai di tengah keragaman, bukan sebagai sumber kekerasan atau eksklusivisme.

Dari segi keilmuan, penelitian ini memperluas horizon studi filsafat Islam dengan menempatkan Musa Asy'arie sebagai bagian dari *arus pemikiran Islam Asia Tenggara* yang mengintegrasikan rasionalitas, spiritualitas, dan kebudayaan. Pemikirannya dapat dibaca sejajar dengan wacana *Islamic peace philosophy* yang berkembang di kawasan ini, terutama dalam upaya membangun paradigma etis terhadap pluralitas dan perdamaian. Dengan menekankan hubungan antara etika, budaya, dan kemanusiaan, Asy'arie berhasil menghadirkan filsafat Islam yang kontekstual, dialogis, dan berakar pada realitas sosial Nusantara.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa etika Islam dapat menjadi dasar bagi filsafat kebudayaan damai yang inklusif dan lintas batas geografis. Secara praksis, pemikiran Musa Asy'arie dapat diimplementasikan dalam pendidikan, dakwah, dan kebijakan sosial yang menumbuhkan kesadaran moral kolektif. Pendidikan, bagi Asy'arie, adalah media utama untuk melakukan revolusi kebudayaan tanpa kekerasan—karena di sanalah nilai-nilai keadilan, toleransi, dan kasih sayang dapat ditanamkan sejak dini.

Akhirnya, etika anti-kekerasan Musa Asy'arie memperlihatkan bahwa Islam memiliki daya kreatif untuk menanggapi problem kemanusiaan modern secara filosofis dan kultural. Ia menawarkan model transformasi sosial yang berbasis pada *human dignity* (martabat manusia) dan *moral wisdom* (kearifan moral), dua prinsip yang sangat dibutuhkan dalam membangun masa depan peradaban Asia Tenggara yang damai, adil, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Mulkhan, A. M., Machasin, Asy'arie, M., Nasution, K., Ilyas, H., & Faiz, F. (2014). Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga. In *Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta*.
- Abdullah, M. A. (2020). MEREDAM MARAH, MENYEBAR RAHMAH Menengok Kembali Peran Agama di Ruang Publik dalam Masyarakat Majemuk. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10622>
- Abidin, M. Z., Wardani, & Rusydi, M. (2014). Kesinambungan dan Perubahan Dalam Kajian Filsafat Islam di Indonesia: Studi Terhadap Pemikiran Harun Nasution, Mulyadhi Kartanegara, M. AMIN Abdullah, dan Musa Asy'arie. *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya*, 2(3).
- ACLED. (2025). *Asia-Pacific overview: June 2025 (data & analysis platform)*.
- Al-Attas, S. M. N. (1968). *Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of The Malay-Indonesia Archipelago*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Al-Attas, S. M. N. (1980). The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education. In *The First World Conference on Muslim Education*.
- Al-Ghazali, M. A. H. (1994). *Ihya 'Ulum al-Din* (Vol. 2). Dar al-Hadits.
- Asy'ari, M. (2002). *Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*.
- Asy'ari, M. (2002). *Berjuang dari Pinggir: Potret Kewirausahaan Musa Asy'arie*. LP3ES.

- Azra, A. (2011). Indonesian Islam: Towards a Moderate Path. In M. J. Montesano (Ed.), *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century* (pp. 107–128). Institute of Southeast Asian Studies.
- Cassirer, E. (1944). The Concept of Group and the Theory of Perception. *Philosophy and Phenomenological Research*, 5(1). <https://doi.org/10.2307/2102891>
- Galtung, J. (2018). Violence, peace and peace research. *Organicom*, 15(28). <https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2018.150546>
- Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). (2018). *Rohingya Crisis 2017–2018: Draft Rapid Impact, Vulnerability and Needs Assessment (Exec. summary)*.
- Human Rights Watch. (2024). *World Report 2024: Thailand*.
- Khan, Z. Z., Iskandi, I., Supriyanto, S., & Kurniawan, M. I. (2023). The Paradigm of Islamic Prophetic Thought Perspective of Kuntowijoyo and Musa Asy'arie. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 14(2). <https://doi.org/10.32923/maw.v14i2.3629>
- Khaqim, M., & Arwani, A. (2019). Attempts To Search For An Islamic Economic Development Model (Analysis Of Philosophical Thought Musa Asy'arie. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.213>
- Koentjaraningrat. (1990). Pengantar Ilmu Antropologi. Edisi baru. In *Undefined*.
- Madjid, N. (2008). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Nieburg, H. L., & Sharp, G. (1974). The Politics of Nonviolent Action. *The Western Political Quarterly*, 27(2). <https://doi.org/10.2307/447771>
- Rahmawati, E., Asy'arie, M., Aryani, S. A., & Waston. (2024). Development of Multiculturalism Values in Religious Education And its Implications for Multicultural and Democratic Student Ethics. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2896>
- Ramakrishna, K. (2009). Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia. In *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*. <https://doi.org/10.5860/choice.47-1093>
- Sangadji, E. Mamang. (2010). Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian. In *CV. Andi Offset. Jakarta* (Issue March).
- SETARA Institute. (2025). *Data release — Condition of Freedom of Religion and Belief in Indonesia 2024 (data summary)*.
- Sochimin, S. (2021). Epistemologi Filsafat Kewirausahaan: Membaca Konsep Entrepreneurship Musa Asy'arie. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5518>
- Syamsuddin, S. (2022). Strategi Pembangunan dalam Ekonomi Islam: Menelusuri Pemikiran Filosofis Musa Asy'arie. *Jurnal Ilmiah Ekonomika & Sains*, 3(2). <https://doi.org/10.54066/jiesa.v3i2.274>
- The Asia Foundation. (2021). *The State of Conflict and Violence in Asia 2021 (report on online hate and conflict)*.
- Time / reporting synthesis (2017–2018). (2018). *Coverage on Marawi siege (2017) and aftermath*.
- Zaprulkhan, Z. (2019). Epistemology of Reconstruction of Prophetic Thinking Methodology In The View of Musa Asy'arie. *KALAM*, 13(1). <https://doi.org/10.24042/klm.v13i1.3978>